
EVIDENCE-BASED POLICY AND PRACTICE: TANTANGAN DAN PENGEMBANGAN

Haris Subhan

Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: harissubhan2207@gmail.com

Abstract

Evidence-Based Policy and Practice (EBPP) is something complex related to planning, implementation, and evaluation. Although the government and organization are seen as not having the capacity to implement it, the underlying problems can be identified. This article proposes a dimension of capability that might underlie practical improvements in EBPP. This framework addresses a spectrum of implementation problems at the organizational and individual levels that are vital for an evidence-based approach in the context of policy and practice.

Keywords: *Evidence-Based policy, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Program.*

A. PENDAHULUAN

Jargon kebijakan dan praktik berbasis bukti (EBPP) telah populer di berbagai bidang kebijakan sosial seperti pendidikan, pekerjaan sosial, peradilan pidana, perawatan kesehatan dan kesehatan mental (Nutley, et al., 2007). Ini telah menjadi bagian dari agenda modernisasi yang lebih luas yang bertujuan untuk mereformasi layanan pemerintah dan mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih besar melalui penerapan bukti penelitian terapan untuk kebijakan dan praktik. Ini sudah termasuk bukti tentang tren luas dan penjelasan masalah sosial dan organisasi, serta bukti yang berkaitan dengan indikator kinerja, pemberian layanan dan evaluasi program (Kepala, 2008a).

EBPP menekankan penyelesaian masalah secara sistematis yang didukung oleh data, analisis risiko dan respons proaktif serta identifikasi. Pemerintah di berbagai yurisdiksi telah membuat pernyataan kebijakan strategis mendukung EBPP, namun ada beberapa perbedaan pendapat yang serius dalam bidang akademik dan kebijakan/praktisi mengenai adopsi dan penerapan EBPP Wilayah-wilayah yang diperebutkan ini mencakup aspek-aspek politik dan ideologis tentang bagaimana masalah “dibingkai”; bagaimana

pendekatan “berbasis bukti” harus diterapkan dalam konteks kebijakan dan praktik tertentu; yang dianggap sebagai bukti andal; dan metode evaluasi yang disukai untuk menginformasikan pengembangan kebijakan dan implementasi program.

Pendekatan yang kami usulkan diarahkan pada khalayak luas, mengingat banyak poin kesamaan yang ada di seluruh bidang kebijakan publik yang berkaitan dengan *EBPP* (Nutley, et al., 2003). Kami menyadari bahwa beberapa masalah yang diteliti dapat bervariasi dalam signifikansi dan karakternya di seluruh konteks kebijakan dan praktik. Seperti yang dikemukakan oleh Nutley perbedaan antara kebijakan dan praktik tidak pernah benar-benar jelas, tulisan ini dimulai dengan membahas apa yang kami sebut dilema kepatuhan/adaptasi dan mengapa hal itu mengacaukan upaya “murni” untuk menghasilkan *EBPP*.

B. PEMBAHASAN

1. Dilema Kepatuhan/Adaptasi Program.

Salah satu tujuan *EBPP* adalah untuk memastikan bahwa semaksimal mungkin, kebijakan dan praktik didasarkan pada penelitian dan didorong oleh data. Sebagai contoh, keluaran yang terkait dengan *EBPP* seperti tinjauan sistematis dan pedoman praktik yang baik bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan mempraktikkan pengambilan keputusan sesuai dengan bukti tentang efektivitas intervensi kebijakan sosial dan model-model contoh pemberian layanan dan penyelesaian masalah. Dampak dari kontribusi semacam itu sangat tergantung pada sejauh mana pengguna akhir (pembuat kebijakan dan praktisi) mematuhi pedoman tentang bertindak dengan cara berbasis bukti (*fidelity*).

Konsep kepatuhan program biasanya dikaitkan dengan perdebatan tentang replikasi program berbasis bukti yang berasal dari uji coba. Relevansinya memiliki aplikasi yang lebih luas di luar konteks ini dan berkaitan dengan agenda berbasis penelitian. Jika panduan praktik yang baik

didasarkan pada bukti, tetapi tidak dipatuhi oleh praktisi atau diabaikan oleh pembuat kebijakan, maka muncul perbedaan yang signifikan antara pekerjaan yang dilakukan dengan bukti dari penelitian. Ini dapat mendistorsi evaluasi hasil strategi karena kurangnya replikasi yang “utuh”; dapat menyebabkan layanan yang tidak efektif untuk kelompok sasaran; atau dapat merusak integritas basis bukti yang terakumulasi tentang kebijakan dan praktik yang efektif.

Sebagai contoh, kegagalan untuk mencapai hasil yang sukses terkait dengan pendekatan berbasis bukti tertentu dapat terjadi hanya dari pembuat kebijakan dan praktisi tidak tetap “utuh” pada (yaitu tidak mereplikasi) desain program asli. Jika perbedaan ini tidak diketahui oleh praktisi, pengamat, evaluator atau intervensi pendanaan yang relevan, hal itu dapat menyebabkan organisasi dan individu menilai secara salah atau tidak adil, program-program berbasis bukti tertentu dianggap tidak akan berfungsi.

Ketika mengadopsi *EBPP*, kebingungan antara memastikan kepatuhan, dan fleksibilitas serta keperluan adaptasi, sulit mencari jalan tengah dalam konteks kebijakan dan praktiknya. Sementara konsep-konsep *EBPP* mungkin menarik bagi para pemimpin pemerintahan yang ingin menanamkan tingkat rasionalitas dan obyektivitas tertentu ke dalam kebijakan dan praktik pengambilan keputusan, sering kali ada kesenjangan antara retorika dan apa yang terjadi di lapangan.

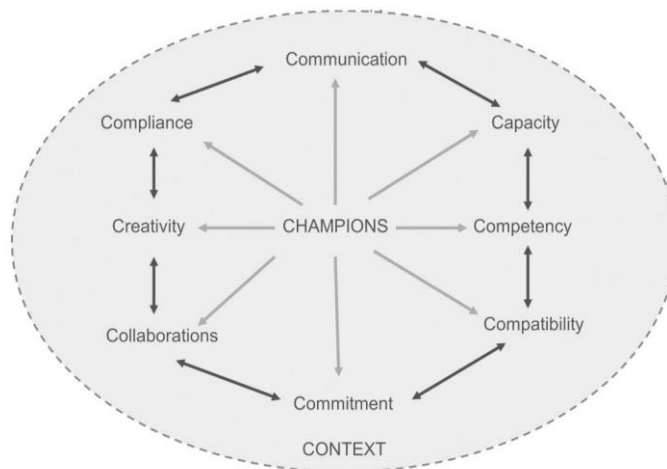
Penelitian menunjukkan bahwa program yang didasarkan pada tujuan *EBPP* dapat menghadapi tantangan yang signifikan selama implementasi, termasuk kekurangan kapasitas lembaga untuk benar-benar beroperasi dengan cara berbasis pada bukti (Coote, et al., 2004; Jewel & Bero, 2008). Praktisi di berbagai bidang kebijakan sosial telah menghadapi masalah yang konsisten karena kekurangan dalam pengetahuan, keterampilan, sumber daya dan proses organisasi (misalnya sistem pengumpulan data yang buruk) yang membantu menghasilkan kondisi di mana *EBPP* sebenarnya dapat dicapai (Denning & Homel, 2007).

Dalam konteks seperti itu, keinginan yang diungkapkan untuk *EBPP* diadopsi dengan kepatuhan yang ketat sebagian besar tidak berarti, karena mungkin lebih masuk akal bagi para pembuat kebijakan dan praktisi untuk hanya “memilih-milah” program berbasis bukti dalam upaya untuk berurusan kepentingan yang lebih luas (misalnya kendala organisasi dan politik). Salah satu alasan untuk masalah tersebut adalah kurangnya proses dukungan untuk meningkatkan pembelajaran positif sebagai dasar untuk memperbaiki dan memperkuat implementasi pendekatan berbasis bukti.

2. Komponen Kerangka Kerja Pembelajaran & Dukungan

Sampai saat ini sejumlah penelitian terbatas telah dilakukan tentang bagaimana pendekatan berbasis bukti dapat ditingkatkan di seluruh konteks kebijakan dan praktik (Bogensneider & Corbett, 2010). Berdasarkan pada bacaan yang luas dari literatur penelitian, kami berpendapat bahwa meningkatkan basis pengetahuan dan keterampilan para pembuat kebijakan dan praktisi sama sekali tidak cukup. Pertimbangan juga harus diberikan pada kondisi lain yang lebih luas yang memungkinkan *EBPP* menjadi terwujud. Meskipun infrastruktur merupakan hal yang central dan penting untuk menentukan prinsip-prinsip inti daripada pedoman *EBPP* yang efektif di berbagai konteks. Oleh karena itu, ini berarti bahwa kerangka kerja tersebut dapat dilihat sebagai sesuatu yang ambigu dan diperdebatkan. Kami mengakui keinginan untuk mengemas model kami dalam bahasa yang dapat dengan mudah dikomunikasikan, tetapi juga mengingatkan untuk tidak memilih atau mengabaikan bagaimana replikasi “utuh” dari semua komponen merupakan bagian dari keseluruhan sistem.

Diagram 1: Components of a Support Delivery System



a. Komunikasi

Mempromosikan *EBPP* akan terhambat jika dikomunikasikan hanya melalui penggunaan sistem teknologi informasi/TI saja seperti database elektronik atau repository hasil penelitian. Ini adalah bentuk penyebaran pasif, dan informasi saja serta tidak menjamin dan tidak memfasilitasi pengambilan pendekatan berbasis bukti. Satu temuan penting dari penelitian yang telah mengeksplorasi berbagai opsi untuk diseminasi adalah bahwa pada akhirnya penggunaannya dikaitkan dengan strategi yang menyediakan ruang bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk mencari, membaca, merenungkan, bertukar ide dan mendiskusikan bukti penelitian (Nutley, et al., 2007). Juga program berbasis bukti lebih mungkin untuk diikuti ketika pengguna akhir yang dituju (misalnya Praktisi) memiliki input ke dalam desain program atau mereka dilibatkan. Ini dapat meningkatkan diseminasi dengan memanfaatkan jaringan komunikasi informal ketika pembuat kebijakan dan praktisi bertukar pengalaman dengan kolega tentang keterlibatan mereka dengan pendekatan berbasis bukti tertentu. Ini menyoroti bahwa komunikasi *EBPP* tidak boleh didasarkan pada pemahaman linear tentang bagaimana transfer pengetahuan terjadi.

b. Kapasitas

Dalam *EBPP* istilah kapasitas sering dimasukkan di bawah “pembangunan/pengembangan kapasitas” dengan sejumlah makna yang beragam (Greenhalgh, et al., 2004). Ini sering digunakan untuk menggambarkan keterampilan, motivasi, pengetahuan dan sikap yang mendasari upaya untuk mengimplementasikan inovasi baik di sektor publik maupun swasta. Kami berpendapat bahwa banyak fitur yang sering dikaitkan dengan kapasitas istilah harus diberi perhatian terpisah missal kompetensi. Kelebihan ini menjadi lebih sulit untuk memberikan panduan kepada pembuat kebijakan atau praktisi tentang apa yang mungkin diperlukan dalam pengembangan kapasitas. Kapasitas pada *EBPP* harus dipahami berlaku pada dua tingkat: umum dan spesifik (Flaspohler, 2008; Hawe et al., 1997). Pertama, kapasitas mengacu pada kapasitas generik yang diperlukan untuk mendukung proses *EBPP*, terutama proses pemanfaatan penelitian sebagai bagian dari pengembangan kebijakan arus utama dan evaluasi sebagai fitur pemberian layanan. Upaya untuk meningkatkan kapasitas umumnya dapat melibatkan pembuatan basis data terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi tentang kelompok klien, dampak program, faktor risiko masyarakat atau model “*best practice*”. Kedua, adopsi inisiatif yang spesifik berkaitan dengan kapasitas. Ini juga mencakup kemampuan yang dirasakan para profesional sendiri untuk mengadopsi dan mematuhi pendekatan berbasis bukti.

c. Kompetensi

Gagasan kompetensi, dalam kaitannya dengan kondisi yang menghambat atau memfasilitasi adopsi program berbasis bukti, patut dianggap sebagai masalah dalam dirinya sendiri. Ini karena personil agen mungkin memiliki kompetensi untuk beroperasi dengan cara yang lebih berbasis bukti (mis. Memiliki keterampilan memecahkan masalah dan analisis data yang relevan) tetapi kapasitas organisasi yang mendukung mungkin tidak ada yang akan memungkinkan mereka untuk menerapkan keterampilan ini dalam tindakan. Bukti dari bidang kepolisian yang berorientasi pada masalah

mendukung klaim ini². Contoh-contoh yang patut dicontoh dari kepolisian yang berorientasi pada masalah sebagian besar merupakan hasil dari inisiatif petugas polisi secara perorangan dan masih merupakan contoh yang langka, dengan lembaga kepolisian yang kurang memiliki kapasitas organisasi untuk mengarusutamakan pendekatan berbasis bukti untuk pekerjaan kepolisian (Scott 2003). Kebalikannya mungkin juga benar, karena lembaga mungkin memiliki sistem yang meningkatkan kapasitas organisasi (mis. Sistem TI dan basis data yang menyusun dan menyebarluaskan bukti penelitian) tetapi staf individu mungkin tidak memiliki kompetensi untuk menggunakan sistem seperti itu untuk potensi penuh mereka.

Kompetensi berkaitan dengan sejumlah keterampilan individu spesifik yang penting untuk implementasi *EBPP*. Ini mencakup bentuk pengetahuan eksplisit dan implisit yang terkait dengan pengalaman kebijakan / praktik sebelumnya yang dapat memberikan wawasan tentang keberhasilan implementasi pendekatan berbasis bukti. Pengetahuan eksplisit diformalkan dalam laporan dan dokumen, dan dapat dikodifikasikan menjadi manual, model, dan prosedur. Menilai kompetensi yang ada, dan mengatasi kekurangan, diperlukan untuk mengevaluasi apakah kebijakan dan konteks praktik tertentu dilengkapi dengan baik untuk menghadapi tuntutan *EBPP*. Pelatihan keterampilan dan basis pengetahuan, dan penyediaan pedoman "*best practice*", juga penting. Pelatihan harus dikaitkan dengan peran spesifik personel terkait yang bertanggung jawab untuk menerapkan pendekatan berbasis bukti, yang membantu untuk mengejawantahkan instruksi formal dan menyoroti relevansinya.

d. Kompatibilitas

Kompatibilitas di sini mengacu pada iklim organisasi yang kondusif untuk penggunaan dan implementasi *EBPP*. Komponen yang dijelaskan sebelumnya membantu menghasilkan iklim seperti itu. Mengatasi kekurangan individu dalam pengetahuan dan keterampilan tidak akan menjamin hasil yang lebih baik. Perlu ada persepsi bersama di antara para profesional bahwa adopsi

EBPP dihargai, didukung dan diharapkan dalam organisasi mereka (Durlak & Du Pre, 2008; Klein & Sorra, 1996). Dengan demikian, kompatibilitas berkaitan dengan kesesuaian antara prinsip-prinsip yang menopang kebijakan atau praktik berbasis bukti dan cara organisasi beroperasi. Tetapi melembagakan cara berfikir dan beroperasi seperti itu dalam organisasi kepolisian sulit karena cara reaktif tradisional di mana polisi telah berfungsi, dengan penangkapan dan hukuman yang lebih baik dan penghargaan atas pendekatan pencegahan (Scott, 2003). Semakin tinggi tingkat kompatibilitas antara iklim organisasi lembaga dan penggunaan pendekatan berbasis bukti tertentu, semakin besar akan penyerapan inovasi tersebut.

e. **Komitmen**

Namun ada satu batasan lebih lanjut: personil harus berkomitmen untuk menggunakannya (Klein & Sorra, 1996). Sementara organisasi atau unit kebijakan resmi dapat mendukung pendekatan berbasis bukti (yaitu ada kompatibilitas formal), itu tidak serta merta berarti bahwa individu-individu di dalam lembaga-lembaga tersebut benar-benar mendukung model kebijakan dan praktik baru (misalnya: terdapat komitmen yang rendah di antara staf). Komitmen adalah atribut level individu yang merujuk pada internalisasi nilai inovasi tertentu. Khususnya apa yang memengaruhi komitmen adalah pandangan profesional mengenai kebijakan dan praktik baru dan yang sudah ada (Greenhalgh, et al., 2004; Klein & Sorra, 1996).

Komitmen memiliki pengaruh penting pada kepatuhan dan adaptasi. Penelitian menunjukkan bahwa jika ada komitmen yang rendah di antara personel agensi terhadap program berbasis bukti, mereka cenderung tidak diimplementasikan dengan kepatuhan (Mihalic, et al., 2008; O'Connor, et al., 2007). Juga personil agen dapat mengubah konten program bukan karena keharusan terkait dengan mengadaptasi inisiatif dengan kondisi lokal, tetapi lebih karena bias pribadi yang timbul dari kurangnya komitmen mereka terhadap strategi tertentu. Dimensi komunikasi yang diuraikan di atas sangat penting untuk mengatasi komitmen dengan berfokus pada bagaimana

mengadopsi program berbasis bukti tertentu bermanfaat dan bertanggung jawab. Komitmen lebih lanjut dapat ditingkatkan dengan menghasilkan kepemilikan program berbasis bukti di antara organisasi pelaksana dengan memastikan mereka memiliki input tentang bagaimana pelaksanaan harus dilanjutkan (Lavis, et al., 2005; Patton, 1998).

Demikian juga menangani masalah kapasitas, kompetensi dan kompatibilitas yang diangkat di atas akan meningkatkan komitmen karena ini membantu meningkatkan kepercayaan diri para profesional kebijakan dan praktik bahwa mereka memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengelola pendekatan berbasis bukti, dan bahwa lingkungan organisasi mereka menghargai praktik-praktik tersebut.

f. Kolaborasi

Salah satu tema sentral dari tulisan ini adalah bahwa bertindak dengan cara berbasis bukti pada tingkat kebijakan dan praktik sangat menantang. Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa *EBPP* sering memb"utuh"kan kolaborasi di antara beberapa penyedia layanan karena sifat kebijakan publiknya kompleks, dan berada di luar kemampuan lembaga mana pun untuk ditangani (Head, 2008a & 2008b, Head, 2008c). Mengingat bahwa kemitraan bergantung pada anggota yang memberikan kontribusi yang baik, mereka seringkali sulit untuk dikelola dan dapat memperoleh manfaat dari dukungan yang membantu memastikan kejelasan fokus, dengan lembaga-lembaga yang bekerja sama memperjelas input dan tanggung jawab mereka untuk sebuah inisiatif. Untuk memastikan kemitraan terbuka dan transparan, proses penyelesaian konflik harus ada. Dukungan khusus oleh koordinator (juara - lihat di bawah), serta sumber daya yang memadai sangat penting.

Kondisi untuk kolaborasi dapat dihasilkan melalui sejumlah pengungkit seperti Memoranda Pengertian, co-lokasi personil agen dalam organisasi mitra, dan pendanaan yang ditargetkan untuk hadiah dan kerja kemitraan sumber daya. Upaya kolaboratif yang menopang pendekatan berbasis bukti akan bervariasi tergantung pada tujuan yang dikejar (misalnya meningkatkan

pengaturan berbagi data, melaksanakan proyek percontohan, atau mereplikasi “*best practice*”), konteks kebijakan dan praktik dari masalah / tantangan yang ditangani, atau jumlah pemangku kepentingan yang terlibat. Faktor-faktor ini akan berdampak pada struktur kolaborasi karena para pemangku kepentingan akan diminta untuk membuat berbagai masukan yang mungkin bersifat jangka pendek dan sementara, atau jangka panjang dan berkelanjutan (Kepala, 2008b). Karenanya dukungan perlu disesuaikan dengan tepat berdasarkan tujuan kolaborasi yang mendasarinya. Analisis dalam bagian sebelumnya yang berkaitan dengan komunikasi, kapasitas, kompetensi, kompatibilitas, dan komitmen sama pentingnya untuk menghasilkan kolaborasi yang kuat. Yang penting fokusnya adalah pada peningkatan kapasitas dan kompetensi berbagai lembaga yang berpartisipasi yang membantu meningkatkan implementasi pendekatan berbasis bukti.

g. Kreatifitas

Replikasi yang utuh pada sistem pendukung untuk *EBPP* harus memungkinkan untuk adaptasi atau apa yang kita sebut kreativitas di sini: yaitu menyediakan ruang untuk inovasi dan eksperimen. Memiliki beberapa tingkat fleksibilitas dalam bagaimana *EBPP* harus disampaikan memberikan ruang bagi lembaga pelaksana untuk berinovasi dengan memodifikasi program agar sesuai dengan kondisi setempat. Jika didokumentasikan dengan baik, dapat membangun pengetahuan penting tentang apa yang berhasil dan dalam kondisi apa. Sementara adaptasi program berbasis penelitian mungkin diperlukan, jika perubahan tersebut menghasilkan kebijakan/hasil praktik yang tidak efektif maka perubahan tersebut jelas tidak diinginkan dan tidak sesuai.

Elliot & Mihalic (2004), merefleksikan pengalaman dengan *Blue Prints for Violence Prevention Initiative*, berpendapat bahwa ketika upaya dilakukan untuk menegakkan kepatuhan terhadap kepatuhan berbasis bukti. Mereka menyatakan bahwa argumen yang mendukung adaptasi lokal sering berasumsi bahwa konteks lokal entah bagaimana diperbaiki dan tidak dapat diubah.

Daripada menanyakan “apakah program ini cocok dengan konteks lokal ini?”), pertanyaan yang lebih tepat adalah: “bagaimana konteks ini harus berubah agar kita berhasil mengimplementasikan program ini di sini?”. Mempertahankan kepatuhan tetap penting, karena memberikan dasar yang diperlukan untuk pengetahuan tentang pendekatan berbasis bukti. Sangat relevan untuk memahami apakah kebijakan dan praktik dapat ditiru atau ditransfer secara lintas konteks. Jika desain asli tidak dipatuhi, menjadi sulit untuk menilai apakah pendekatan berbasis bukti tertentu dapat digeneralisasikan.

h. Disiplin/ Kepatuhan

Institusionalisasi *EBPP* membutuhkan proses untuk memantau pengambilan dan adopsi dalam konteks profesional yang relevan. Dengan menggunakan istilah kepatuhan, kami tidak mengacu pada proses pemantauan “*top-down*”. Pemantauan perlu fokus pada isu ganda kepatuhan dan adaptasi. Sehubungan dengan kepatuhan, pemantauan kepatuhan berfokus pada protokol implementasi untuk komponen inti. Dalam konteks adaptasi ini berkaitan dengan pemantauan kemungkinan penyimpangan dari komponen inti. Penyimpangan dari teori dan konten program yang disepakati selalu merupakan kemungkinan karena implementasi jarang mengikuti jalur linier (Durlak, 1998). Oleh karena itu menghasilkan kepatuhan terhadap *EBPP* harus didukung oleh dialog dengan profesional kebijakan dan praktik yang relevan, sehingga “*utuh*” alasan yang mungkin untuk modifikasi dapat diidentifikasi lebih awal dan ditangani. Kepatuhan dengan konten program yang disepakati akan ditingkatkan dengan upaya yang fokus pada proses pengiriman dukungan berikutnya yang sudah dibahas. Pelatihan staf yang intensif tentang implementasi akan membantu memastikan kepatuhan (menangani masalah kompetensi) dengan mengklarifikasi peran para pembuat kebijakan dan praktisi.

i. Juara

Proses untuk *EBPP* tidak akan mandiri. Harus ada individu atau kelompok yang dapat membantu mendorong proses. Inilah sebabnya mengapa peran juara tersebut dipusatkan dalam keseluruhan sistem dukungan dan dihubungkan dengan “utuh” elemen yang diilustrasikan dalam Diagram 1 di atas. Pentingnya perantara tersebut didukung dalam literatur. Misalnya literatur tentang difusi inovasi menunjukkan bahwa agensi yang merupakan pengadopsi awal inovasi ditandai dengan memiliki perantara (mis. Pemimpin opini dan agen perubahan) yang memainkan peran kunci dalam meyakinkan orang lain untuk mengadopsi inovasi tertentu (Rogers, 2003). Peran-peran penghubung atau keterkaitan ini juga dianggap penting untuk memahami proses pemanfaatan penelitian dalam berbagai konteks kebijakan dan praktik (Nutley, et al 2007).

C. KESIMPULAN

Kerangka yang kami usulkan untuk mendukung proses *EBPP* yang kuat dan praktis bertujuan untuk mengatasi spektrum masalah implementasi di tingkat organisasi dan individu yang sangat memengaruhi pendekatan berbasis bukti dalam konteks kebijakan dan praktik. Kami menyadari bahwa ada beberapa tumpang tindih yang signifikan di antara berbagai komponen kerangka kerja, dan bahwa komponen-komponen ini akan bervariasi di berbagai bidang kebijakan dan praktik (karenanya penekanan penting pada konteks). Titik rujukan utama untuk analisis kami telah difokuskan pada kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan tantangan implementasi, tetapi masalah serupa mungkin relevan dengan beberapa aspek pengaturan sosial berbasis masyarakat. Ketika program memb”utuh”kan kerja sama antara beberapa lembaga yang mampu merespons secara positif tantangan-tantangan ini dan yang lainnya dengan kemampuan yang lemah, sejumlah masalah tertentu muncul untuk memastikan proses keseluruhan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Kami berharap kerangka kerja ini menyediakan templat yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan praktisi yang tertarik untuk mengatasi tantangan implementasi *EBPP*. Konfigurasi praktis sistem pendukung *EBPP* akan bervariasi di berbagai bidang kebijakan dan praktik. Pengalaman masa depan dan penelitian lebih lanjut harus membantu dalam mempelajari bagaimana pertimbangan isu-isu tersebut dapat membantu dalam melindungi dan mempromosikan kepentingan program, klien, praktisi, dan pembuat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifani, M. A., Sari, A. L., & Rifkah, R. (2018). Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 147-155.
- Azocar, F., Cuffel, B., Goldman, W., & McCarter, L. (2003). The Impact of Evidence-Based Guideline Dissemination for the Assessment and Treatment of Major Depression in a Managed Behavioral Health Care Organization. *Journal of Behavioural Health Services & Research*, 30 (1), 109-118.
- Boaz, A. G., Levitt, R., & Solebury, W. (2008). Does Evidence-Based Policy Work? Learning From the UK Experience. *Evidence & Policy*, 4 (2), 233-253.
- Cabinet Office. (1999). *Modernising government*, Cm 4310, London: The Stationery Office, www.archive.official-documents.co.uk/document/cm43/4310/4310.htm
- Castro, F.G., Barrera, M. & Martinez, C.R. (2004). The Cultural Adaption of Prevention Interventions: Resolving the Tension Between Fidelity and Fit. *Prevention Science*, 5 (1), 41-45.
- Coote, A., Allen, J., & Woodhead, D. (2004). *Finding Out What Works: Understanding Complex, Community-Based Initiatives*. London: King's Fund.
- Cherney, A. (2009). Exploring the Concept of Research Utilisation: Implications For Evidence-Based Crime Prevention. *Crime Prevention and Community Safety: An International Journal* , 11 (4), 243-257.
- Dahl, R. (1947). The Science of Public Administration. *Public Administration Review*, 7(1).

- Davies, H., Nutley, S., & Walter, I. (2008). Why Knowledge Transfer is Misconceived For Applied Social Science. *Journal of Health Services Research and Policy*, 13 (3), 188-190.
- Denning, D., & Homel, R. (2007). The Challenges of Turning Developmental Theory into Meaningful Policy And Practice, in A. France & R. Homel (eds) *Pathways and Crime Prevention: Theory, Policy and Practice*. Willan Publishing, Cullompton, Devon, pp 298-318.
- Dumas, J. E., Lynch, A. M., Laughlin, J. E., Smith, E. P., & Printz, R. J. (2001). Promoting Intervention Fidelity: Conceptual Issues, Methods, and Preliminary Results From The Early Alliance Prevention Trial. *American Journal of Preventive Medicine*, 20, 38-47.
- Durlak, J. A. (1998). Why Implementation Is Important. *Journal of Prevention and Intervention in the Community*, 17 (2), 5-18.
- Engkus, E. (2017). Implementasi Undang-Undang Perdagangan: Implikasinya Dalam Kebijakan Pengadialan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *Implementasi Undang-undang Perdagangan: Implikasinya Dalam Kebijakan Pengadialan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat*. 18(1), 1-144.
- Gulick, L., & Urwick, L. (1937). *Papers on the Science of Administration*. New York: Institute of Public Administration.
- Kartasasmita, G. (2007). *Administrasi Pembangunan*. Diakses dari www.ginajar.com. Tanggal, 28-11-2018.
- La Palombara, Y. (1963). *Bureaucracy and Political Development*. Princeton: Princeton University Press.
- Price, D. K. (1965). *The Scientific Estate*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rasyid, A. (2014). *Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Moro Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Tahun 2012-2014*. Halaman 1-5.
- Siagian, S. P. (2007). *Administrasi Pembangunan: Kosep, Dimensio, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simon, H. (1947). *Administrative Behavior*. New York: Macmillan Co.
- Suriasumantri, J. S. (1985). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suwarsono & Alvin Y. So. (1994). *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tjokroamidjojo, B. (1985). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Weingast, B., & Moran, M. (1983). Bureaucratic Discretion or Congressional Control? Regulatory Policy-making by the Federal Trade Commission. *Journal of Political Economy*, 91:765-800.

Wilson, J. Q. (1989). *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It*. New York: Basic.